



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANAK AGUNG ISTRI INTEN WIRADEWI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 681123

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.272.200.000**

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 322.200.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL
SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/260 m2 di KAB / KOTA KOTA
DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **408.000.000**

1. MOTOR, HONDA NF 125 TRF, 125 CC Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE Tahun 2018,
HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11BF1C A/T BEAT Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA F1C02N28LO A/T (SCOOPY) Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT CKD Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 180.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE Tahun 2023,
HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **135.900.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.162.518.174
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.978.618.174
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.978.618.174

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.